



## KPKNL SINGKAWANG

Jl. Aliyayang No. 02, Singkawang

Email: [kpknsingkawang@kemenkeu.go.id](mailto:kpknsingkawang@kemenkeu.go.id)

Website: [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

Telephone (0562) 634803 ; Fax (0562)  
632342

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT**

# Laporan Kinerja 2021

## KPKNL SINGKAWANG

*“LAKIN mempunyai beberapa fungsi, yakni merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja KPKNL Singkawang”*

### PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang sebagai salah satu Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Kalimantan Barat, telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021. LAKIN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singkawang selama tahun 2021.

Penyusunan LAKIN KPKNL Singkawang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor ND-53/KN.1/2022 tanggal 04 Januari 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi, yakni merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja KPKNL Singkawang.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singkawang telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Singkawang dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Singkawang dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Nomor 8/KN.23/2021 tanggal 31 Januari 2021. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN tahun 2021 didasarkan pada hasil capaian kinerja IKU yang berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2021 sebesar 109,17%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Singkawang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Singkawang Tahun 2021.

Kami berharap agar penyusunan LAKIN tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singkawang.

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan pelayanan secara terus-menerus yang dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat dilaksanakan sesuai harapan *stakeholder*.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singkawang yang telah berusaha menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan strategis pada Kontrak Kinerja Tahun 2021 ini, kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2022.

Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>11</b>
<b>A. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI.....</b>	<b>11</b>
<b>B. PERAN STRATEGIS KPKNL .....</b>	<b>18</b>
<b>C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) .....</b>	<b>21</b>
<b>D. SISTEMATIKA LAPORAN .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>24</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS .....</b>	<b>24</b>
<b>B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA.....</b>	<b>32</b>
<b>C. ADDENDUM KONTRAK KINERJA .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>36</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>36</b>
1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.....	40
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.....	47
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien .....	52
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif.....	54
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.....	58
6. Edukasi yang Efektif .....	65
7. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif .....	66
8. Sasaran Strategis SDM yang Kompeten.....	67
9. Sasaran Strategis Organisasi yang fit-for-purpose .....	69
10. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal .....	72
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>74</b>
<b>C. KINERJA LAINNYA.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>

## **LAPORAN KINERJA**

*disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (outcome). LAKIN KPKNL Singkawang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran.*

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang tahun 2021, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LAKIN KPKNL Singkawang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di KPKNL Singkawang.

Sebagai salah satu instansi vertikal dan unit operasional di lingkungan DJKN, KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang

kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Singkawang menyelenggarakan fungsi: (1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (5) pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) pelaksanaan pelayanan lelang; (7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; (9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (10) pelaksanaan bimbingan kepada Pelelang; (11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (14) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singkawang mempunyai visi, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu: (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan

kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Singkawang; (6) Menjembatani informasi mengenai kebijakan Kementerian Keuangan, Kantor Pusat DJKN, dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang terkait dengan kekayaan negara ke masyarakat di wilayah kerja KPKNL Singkawang.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singkawang adalah (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan pelayanan penilaian; (3) Optimalisasi pengurusan Piutang Negara; (4) Peningkatan pelayanan lelang; (5) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis: 1 (satu) sasaran merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; 2 (dua) sasaran merupakan bagian dari *Customer Perspective*, yaitu (1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (2) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien; 4 (empat) sasaran merupakan bagian dari *Internal Process Perspective*, yaitu 1 (satu) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, 2 (dua) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, 3 (tiga) Edukasi yang Efektif, 4 (empat) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; 3 (tiga) sasaran merupakan bagian dari *Learning & Growth Perspective*, yaitu 1 (satu) SDM yang Kompeten, 2 (dua) Organisasi yang *Fit For Purpose*, 3 (tiga) Pengelolaan Keuangan yang Optimal. Sasaran strategis pertama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, dengan capaian 99,09%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU, yaitu (1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan realisasi sebesar 83,87% dari target 62%; (2) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan realisasi sebesar 49,79% dari target 100%; (3) Persentase Penurunan outstansing piutang negara (saldo PNDS s.d 2017) dengan realisasi sebesar 184% dari target 100%.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dengan capaian 117,17%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang dengan realisasi sebesar 98,80 dari target 87; (2) Persentase realisasi pokok lelang dengan realisasi 127,00% dari target 100%.

*“Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singkawang tahun 2020 adalah sebesar 109,17% dalam kategori hijau”*

Sasaran strategis ketiga yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien, dengan capaian 104,47%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL dengan realisasi sebesar 4,91 dari target 4,70.

Sasaran strategis keempat yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, dengan capaian 114,75%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU yaitu, (1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan realisasi sebesar 107,84% dari target 100%; (2) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan realisasi 122,22% dari target 100%; (3) Deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan realisasi 0% dari target 22%.

Sasaran strategis kelima yaitu Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, dengan capaian 115,46%. Capaian tersebut diperoleh dari 4 (empat) IKU yaitu, (1) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN dengan realisasi sebesar 121,43% dari target 100%; (2) Persentase produktivitas lelang dengan realisasi sebesar 39,60% dari target 35%; (3) Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional* dengan realisasi sebesar 100% dari target

92%; (4) Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN dengan realisasi sebesar 0% dari target 12,50%.

Sasaran strategis keenam yaitu Edukasi yang Efektif, dengan capaian 103,74%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dengan realisasi sebesar 92,33 dari target 89.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, dengan capaian 117,65%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara dengan realisasi sebesar 100% dari target 85%.

Sasaran strategis kedelapan yaitu SDM yang Kompeten, dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%.

Sasaran strategis kesembilan yaitu Organisasi yang *Fit for Purpose*, dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu, (1) Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja dengan realisasi sebesar 98,95 dari target 75; dan (2) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan realisasi sebesar 98,48 dari target 80.

Sasaran strategis kesepuluh yaitu Pengelolaan Keuangan yang Optimal, dengan capaian 99,08%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 94,62% dari target 95,5%.

*“KPKNL  
mempunyai  
tugas  
melaksanakan  
pelayanan di  
bidang  
kekayaan  
negara,  
penilaian,  
piutang negara  
dan lelang”*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

#### 1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam struktur organisasinya, KPKNL Singkawang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan penyesuaian dan penetapan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL menyelenggarakan

fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

## **2. Struktur Organisasi**

KPKNL Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Pejabat Eselon III), 3 (tiga) Kepala Seksi dengan 1 (satu) Kepala Seksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Subbagian (Pejabat Eselon IV), dan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang memiliki tugas sebagai berikut.

**a. Subbagian Umum**

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis kerja, keuangan, tata usaha, rumah beban tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

**b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara/kekayaan negara.

**c. Seksi Piutang Negara**

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

**d. Seksi Hukum dan Informasi**

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan

kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

**e. Seksi Kepatuhan Internal**

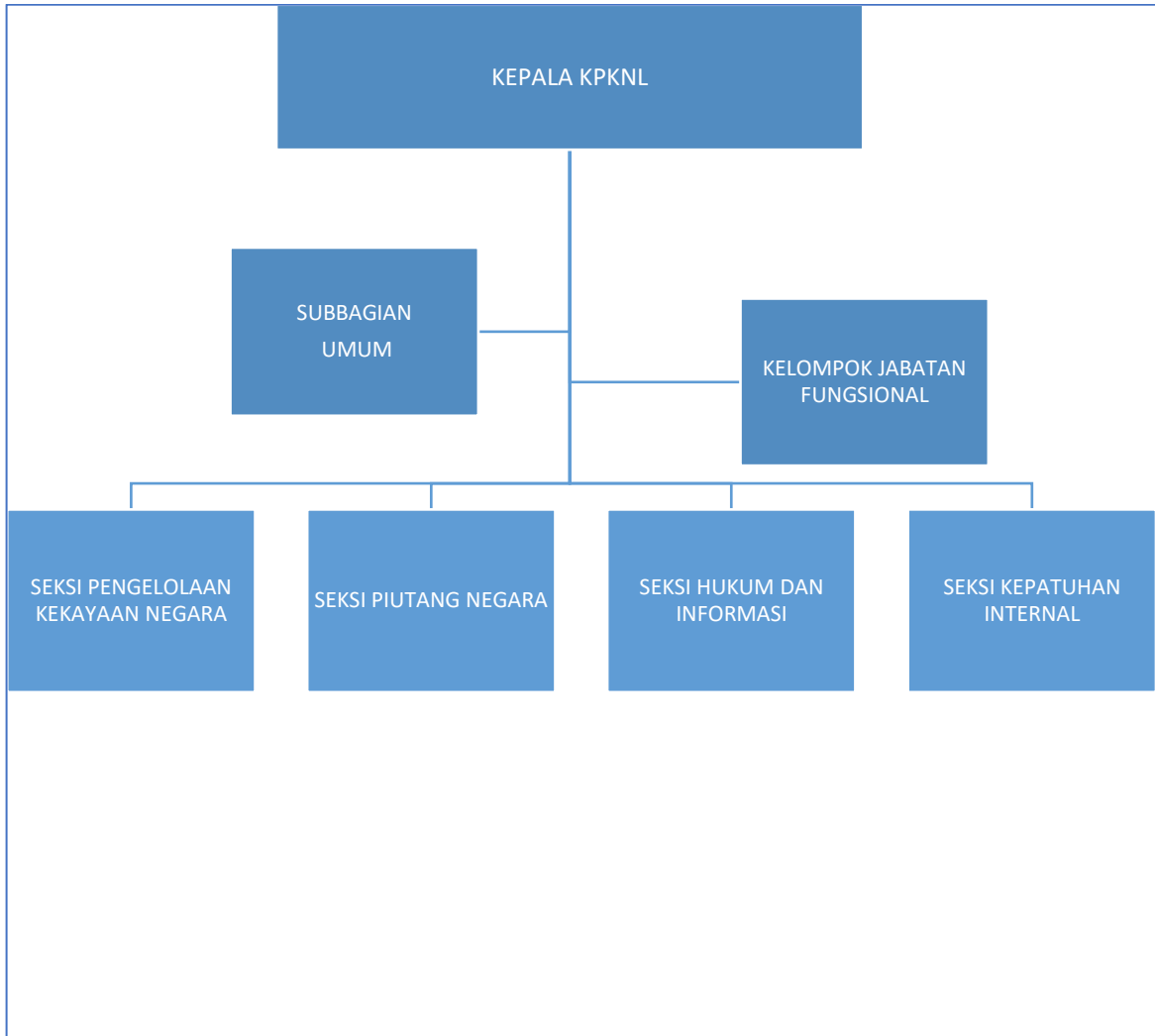
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Struktur organisasi KPKNL Singkawang saat ini dapat dilihat pada bagan berikut :

**BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**



### 3. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singkawang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai, sebagai berikut.

**Daftar Pegawai KPKNL Singkawang Tahun 2021**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Pangkat/Gol</b>	<b>Pendidikan</b>
<b>Kepala KPKNL</b>			
<b>Kepala KPKNL</b>	Odyses Medwan Sinurat	Pembina Tk. I / IV.b	S1
<b>Sub Bagian Umum</b>			
<b>Kasubbag Umum</b>	Eko Budi Hariyanto	Penata / III.c	S2
<b>Bendahara Pengeluaran</b>	Vicencia Mita Haninditya	Pengatur / II.c	D3
<b>Sekretaris</b>	Adinda Tri Zenuriasari	Pengatur / II.c	D3
<b>Pelaksana</b>	Maulana Aji Prakoso	Pengatur / II.c	D3
<b>Pelaksana</b>	Lunda Nine Aleva	Pengatur Muda / II. a	D1
<b>Pelaksana</b>	Irianto	Pengatur Tk.I / II.d	SLTA
<b>Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara</b>			
<b>Kepala Seksi</b>	Ratna Astuti	Penata Tk.I/ III.d	S2
<b>Pelaksana</b>	Ahmad Taufiq Ramadhan	Pengatur Tk.I / II.d	D3
<b>Seksi Pelayanan Penilaian</b>			
<b>Plt. Kepala Seksi/ Fungsional Penilai</b>	Dhyan Virawan Suhendra	Penata Muda Tk. I / III.b	S1
<b>Pelaksana</b>	Arlie Ilham Yusdika	Pengatur Tk.I / II.d	D3
<b>Pelaksana</b>	Regina Ria Karolina	Penata Muda / III.a	S1
<b>Seksi Piutang Negara</b>			
<b>Plt. Kepala Seksi</b>	Retno Nur Indah	Penata/III.c	S2
<b>Pelaksana</b>	Granthis	Pengatur Tk.I / II.d	SLTA
<b>Pelaksana</b>	Supriyadi	Pengatur Tk.I / II.d	SLTA
<b>Seksi Pelayanan Lelang</b>			
<b>Kepala Seksi</b>	Martha Nelly S.H	Penata /III.c	S1
<b>Pelaksana</b>	Velient Vinandha	Pengatur / II. c	D3
<b>Seksi Hukum dan Informasi</b>			
<b>Kepala Seksi</b>	Retno Nur Indah	Penata /III.c	S2
<b>Bendahara Penerimaan</b>	Arifatul Faizah	Pengatur / II.c	D3
<b>Pelaksana</b>	Abdul Muas	Penata Muda Tk.I / III.b	S1
<b>Seksi Kepatuhan Internal</b>			
<b>Kepala Seksi</b>	Domas Meida Budiyanto	Penata /III.c	S1
<b>Pelaksana</b>	Ayu Seger MP	Penata Muda / III.a	S1
<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>			
<b>Fungsional Pelelang</b>	Sandhi Arifani	Penata Muda Tk. I / III.b	S1
<b>Fungsional Pelelang</b>	Arifin	Penata Muda / III. a	S1
<b>Fungsional Penilai</b>	Decky Fitriadi	Penata Muda / III.a	S1

#### **4. Wilayah Kerja**

KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan penyesuaian dan penetapan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Singkawang bertambah menjadi 5 (lima) wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.

*“KPKNL memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang”*

## **B. PERAN STRATEGIS KPKNL**

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis, sebagai berikut.

### **1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara**

Peran strategis KPKNL di bidang pengelolaan kekayaan negara, sebagai berikut.

#### **a. Barang Milik Negara**

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

## b. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, penilaian dilakukan terutama terhadap penyelesaian atau tindak lanjut temuan BPK dan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah, Kekayaan Negara Lain-lain seperti aktiva tetap BUMN.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, dan menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1513/SJ.7/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan, serta Surat Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1553/SJ.7/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan Tahun 2017, serta berkenaan dengan jadwal pelaksanaan dan demi tercapainya target penilaian kembali BMN Kementerian Keuangan yang telah selesai dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang.

## 2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan (NPL)* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah yang timbul berdasarkan berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

## 3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat. Selain itu, lelang merupakan sarana dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang berasal dari putusan/penetapan pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan barang rampasan/sitaan/temuan/tegahan. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

#### **4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara**

KPKNL Singkawang dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, memperoleh hasil berupa biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### **C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Singkawang masih menghadapi beberapa permasalahan utama yang merupakan tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Singkawang dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat dilihat pada komposisi pegawai pada KPKNL Singkawang, yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 24 pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata 2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Singkawang;
2. Daya beli masyarakat dan minat terhadap barang yang dijual melalui lelang masih rendah;
3. Pengelolaan piutang negara yang masih belum maksimal dikarenakan hal-hal tertentu yaitu umur piutang yang dikelola KPKNL Singkawang yang sudah lama dan tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur yang tidak diketahui, dan itikad baik debitur untuk membayar hutang masih rendah.
4. Adanya kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) juga menjadi permasalahan tersendiri yang dapat mempengaruhi KPKNL Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Singkawang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Ringkasan Eksekutif**, yang menguraikan secara singkat tentang visi dan misi DJKN yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang, tujuan, sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian dan kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

**Bab I : Pendahuluan**, yang menguraikan penjelasan umum organisasi seperti tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi dan komposisi pegawai KPKNL Singkawang. Selain itu juga ditekankan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh KPKNL Singkawang serta sistematika laporan.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Singkawang tahun 2021 termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja bila ada.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan tentang capaian kinerja organisasi yang berisi analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target awal tahun, target addendum dan realisasi kinerja KPKNL Singkawang tahun 2021. Selain itu juga diuraikan tentang capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, menjelaskan upaya-upaya dan kendala dalam pencapaian target kinerja KPKNL Singkawang tahun 2020, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, analisis atas rencana aksi atau mitigasi resiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja dan rencana aksi kedepan. Pada Bab ini juga diuraikan

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja KPKNL Singkawang tahun 2020.

**Bab IV : Penutup**, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Singkawang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Singkawang untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain sistematika tersebut di atas LAKIN KPKNL Singkawang tahun 2021 dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai dokumen pendukung.

*“Visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”.*

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis DJKN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 .

Rencana Strategis KPKNL memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan ke dalam frasa sebagai berikut.

**Pengelola kekayaan negara** adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

**Profesional** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

**Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (1) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang; (2) peningkatan pembiayaan dalam negeri; serta (3) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Singkawang menetapkan Misi, yang terdiri dari:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.
6. Menjembatani informasi mengenai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DJKN yang terkait dengan kekayaan negara ke masyarakat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL untuk periode 2020-2024 adalah (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan pelayanan penilaian; (3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara; (4) Peningkatan pelayanan lelang; (5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

KPKNL dalam mencapai tujuan tersebut, telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024. KPKNL Singkawang dalam mencapai tujuan tersebut telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
  - b. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel.
  - c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
  - a. Pengurusan piutang negara yang optimal;
  - b. PNBPN dari pengurusan piutang negara yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
  - a. Pelayanan lelang yang optimal.
  - b. PNBPN dari pelayanan lelang yang optimal.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
  - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
  - b. SDM yang kompetitif.
  - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
  - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang selaku unit pelaksana DJKN. Strategi tersebut harus

mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Singkawang yang akan dilaksanakan adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- I. Penyempurnaan dan penguatan regulasi di bidang pengelolaan BMN
  - a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
  - b. Memberikan masukan terkait regulasi di bidang pengelolaan BMN ke Kanwil DJKN Kalimantan Barat
- II. Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN
  - a. Digitalisasi pengelolaan BMN dalam rangka menyajikan nilai BMN yang akurat.
- III. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif
  - a. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN
- IV. Percepatan sertifikasi BMN
  - a. Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP
  - b. Pembuatan Nota Kesepahaman antara DJKN, BPN dan K/L terkait program sertifikasi BMN

2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, dan *In House Training* di bidang penilaian.
- b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.

- c. Melakukan *survey* data harga jual dan harga sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah kerja KPKNL Singkawang. Menginput *database* penilaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi.
  - d. Penilaian (SIP) sebagai aplikasi yang membantu kegiatan penilaian.
  - e. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
- a. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang negara/daerah;
  - b. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang *channeling* dan *risk sharing*;
  - c. dari BUMN/D dan lembaga non perbankan;
  - d. Mengintensifkan penagihan secara langsung (*door to door*) kepada debitur;
  - e. Menerbitkan pengumuman panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutang;
  - f. Melakukan pemetaan terhadap BKPN yang potensial;
  - g. Melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain debitur;
  - h. Mengintensifkan pelaksanaan lelang PUPN; dan
  - i. Mengintensifkan hubungan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang yang optimal antara lain:
- I. Meningkatkan pelayanan administrasi lelang. Peningkatan pelayanan administrasi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kepada pengguna jasa lelang dilakukan dengan cara:

- a. Mengadministrasikan kegiatan sebelum lelang dan sesudah lelang dengan menerapkan prosedur lelang sesuai *Standard Operation Procedure (SOP)* secara ketat.
  - b. Meningkatkan kemampuan pegawai di Seksi Lelang dan instruktur jaminan lelang dengan cara mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh DJKN yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
  - c. Membuat *database* minuta risalah lelang.
  - d. Mengadakan brosur-brosur dan pamflet yang berkaitan dengan pelayanan lelang.
  - e. Sosialisasi *e-auction* kepada *stakeholder*.
  - f. Menambah jumlah pejabat lelang aktif di KPKNL Singkawang
- II. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
- a. Peningkatan frekuensi lelang. Peningkatan frekuensi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP maka intensitas pelaksanaan lelang harus terus ditingkatkan baik lelang konvensional maupun *e-auction*. Jumlah frekuensi lelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari upaya adanya penggalian potensi lelang.
  - b. Menyebarkan informasi objek lelang. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan lelang perlu dilakukan strategi pemasaran yang baik, pemasaran berkaitan dengan informasi objek lelang. Oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan baik oleh penjual maupun KPKNL. KPKNL Singkawang mengupayakan penyebaran informasi objek lelang baik secara lisan, selebaran pengumuman, maupun internet dan diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap barang-barang yang akan dilelang.
  - c. Meningkatkan pelayanan *e-auction* dan penggunaan 100% *e-auction*.

- d. Melakukan penggalan potensi lelang. Kegiatan penggalan potensi lelang masih terus akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan frekuensi permohonan lelang yang terus meningkat dari tahun ke tahun, penggalan dengan cara kunjungan ke pemohon lelang dalam waktu bersamaan akan diperoleh gambaran adanya potensi yang dimiliki oleh pemohon lelang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon lelang. Disamping dengan kunjungan ke pengguna jasa lelang, penggalan dilakukan dengan cara membuat surat himbuan kepada pengguna jasa yang mempunyai potensi untuk melaksanakan lelang.

5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
- b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para *stakeholder*.
- d. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *knowledge sharing*.
- e. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL untuk mendapatkan suatu hasil. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu: (1) Tema Kekayaan Negara

dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan (2) Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara.

## **B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA**

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL. Sasaran Strategis KPKNL Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL. Peta Strategi KPKNL tahun 2021 memuat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis.

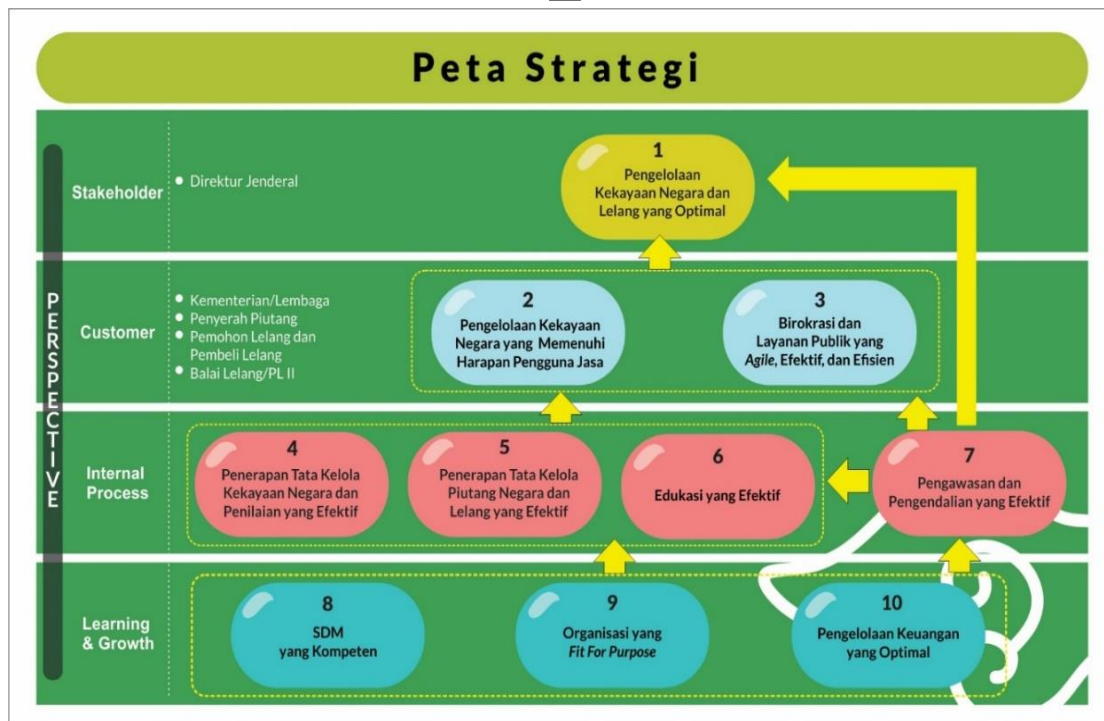
Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

- 1 (satu) sasaran yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
- 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian dari *customers perspective*, yaitu:
  - (1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

- (2) Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif dan efisien
- 4 (empat) sasaran yang merupakan bagian dari *internal process perspective*, yaitu:
  - (1) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif
  - (2) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
  - (3) Edukasi yang Efektif
  - (4) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
- 3 (tiga) sasaran merupakan bagian dari *learning and growth perspective* yaitu:
  - (1) SDM yang Kompeten
  - (2) Organisasi yang *Fit for Purpose*
  - (3) Pengelolaan Keuangan yang Optimal

**PETA STRATEGIS DJKN  
TAHUN 2021**

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar  
Kemakmuran Rakyat



Peta strategi DJKN mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2021 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU yang berada di KPKNL Singkawang.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Kontrak Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2021**

No	Uraian IKU	Target 2021
<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>		
1.	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62%
2.	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan lelang (PNBP)	100%
3.	Tingkat penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>		
4.	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	87
5.	Persentase realisasi hasil lelang (pokok lelang)	100%
<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>		
6.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,70
<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>		
7.	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi	100%
8.	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)	100%
9.	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
<b>Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>		
10.	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
11.	Persentase produktivitas lelang	35%
12.	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
13.	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,50%
<b>Edukasi yang Efektif</b>		
14.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89

Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
15.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
SDM yang kompeten		
16.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
Organisasi yang fit for purpose		
17.	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	75
18.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
Pengelolaan Keuangan yang Optimal		
19.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

### C. ADDENDUM KONTRAK KINERJA

Pada tahun 2021 terdapat beberapa IKU yang dilakukan addendum dari target nominal yang telah ditentukan pada awal tahun 2021. Addendum Kontrak Kinerja (KK) berisi addendum penambahan/pengurangan IKU dan perubahan *trajectory* target IKU. Addendum manual IKU yang berisi perubahan komponen dalam manual IKU yang terdiri atas perubahan *raw data* target IKU dan komponen lainnya. Addendum IKU dilakukan bagi unit KPKNL yang sudah mencapai target tahunan pada semester I.

Pada semester I Tahun 2021 terdapat beberapa IKU KPKNL Singkawang yang telah mencapai target tahunan. Raw data IKU pada KPKNL Singkawang yang dilakukan addendum yaitu:

No	Raw Data	Target Awal Tahun	Addendum
1.	Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi PPN	2.000.000	5.969.572
2.	Penurunan Outstanding Piutang Negara	6.000.000	110.012.594
3.	Penerimaan Negara dari Bea Lelang	1.692.000.000	2.878.334.218
4.	Pokok Lelang	45.000.000.000	78.874.040.979

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini merupakan uraian yang berisi analisis capaian kinerja yang berupa perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; penjelasan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; dan rencana aksi untuk tahun kedepan.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2021, diperoleh hasil 17 (tujuh belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan, 1 (satu) IKU kurang maksimal dengan indikator kuning dan 1 (satu) IKU tidak maksimal dengan indikator merah. Namun secara keseluruhan KPKNL Singkawang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik atau melebihi 100% dengan indikator hijau yaitu sebesar 109,17%.

*Capaian Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2021*

No.	Uraian IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Max. 120%
1.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	83,87%	120,00%
2.	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	49,79%	49,79%
3.	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	184%	120,00%
4.	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87	98,80	113,56%
5.	Persentase realisasi pokok lelang	100%	127%	120,00%
6.	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,70	4,91	104,47%
7.	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	107,84%	107,84%
8.	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	122,22%	120,00%
9.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0,00%	120,00%
10.	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	121,43%	120,00%
11.	Persentase produktivitas lelang	35%	39,60%	113,15%
12.	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100%	108,70%
13.	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,50%	0,00%	120,00%
14.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	92,33	103,74%
15.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100,00%	117,65%
16.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
17.	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	98,95	120,00%
18.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	98,48	120,00%
19.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	94,62%	99,08%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				109,17%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir

No.	Uraian IKU	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							100 %	102,8 8%	62%	83,87 %
2.	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	231,3 7%	100%	97,08 %	100%	132,0 3%	100 %	144,5 4%	100%	49,79 %
3.	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)							3%	14,35 %	100%	184%
4.	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang			80	96,92	85	99,27	86	97,62	87	98,80
5.	Persentase realisasi pokok lelang	100%	109,6 8%	100%	123,8 4%	100%	93,77 %	100 %	114,4 8%	100%	127%
6.	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,22	4,55	4,25	4,82	4,82	4,89	4,6 3	4,90	4,70	4,91
7.	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan			100%	113,3 3%	100%	100%	100 %	100%	100%	107,8 4%
8.	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)			30%	31,96 %	32%	35,89 %	100 %	120,6 9%	100%	122,2 2%
9.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian							30%	0%	22%	0%

10.	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP							100 %	155,41 %	100%	121,43 %
11.	Persentase produktivitas lelang							34%	49,19 %	35%	39,60 %
12.	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	60%	76%	85%	100%	90%	100%	90%	100%	92%	100%
13.	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN									12,50%	0%
14.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87	87,35	85	85,46	85	88,85	89	90,09	89	92,33
15.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara							80%	100%	85%	100%
16.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	100%	90%	100%	87%	100%	100%	120%	100%	120%
17.	Nilai hasil review pengelolaan kinerja					97	98,07	70	84,05	75	98,95
18.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator							80	99,67	80	98,48
19.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	108,19 %	95%	97,16%	95%	95,24%	95%	96,82 %	95,5	94,62 %

Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu-Three KPKNL

Singawang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

## 1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

### a. Indikator Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal				
	1a- Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	50%	55%	62%	MAX/ TLK
Realisasi (Rp)	-	83,33%	83,87%	83,87%	
Capaian	-	83,33%	83,87%	83,87%	

Realisasi IKU Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 83,87%. IKU tersebut dihitung atas Total BMN pada Satker yang Telah Selesai Pengukuran SBSK-nya atas target BMN yang ditetapkan. Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2021 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK, serta penyampaian data target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker kurang memahami peraturan pengadaan BMN tanah/bangunan dan peraturan SBSK. Langkah yang diambil untuk meminimalisir hal tersebut yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2021 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

tahun 2022.; (2) Melakukan verifikasi data NUPBMN target yang telah diterima bersama dengan Kanwil DJKN Kalbar; (3) Melakukan monev terhadap progress penyelesaian pendataan dan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

**b. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)**

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal				
	1b- Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target sebelum adendum	10%	30%	60%	100% (Rp11.367.333.000)	MAX/ TLK
Target setelah adendum	10%	30%	60%	100% (Rp12.679.303.000)	
Realisasi (Rp)	467.345.631	3.530.016.313	4.357.849.870	6.312.942.649	
Capaian kontrak awal	5,54%	32,504%			
Capaian kontrak adendum	3,686%	27,841%	34,37%	49,789%	

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Aset adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

Realisasi PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp2.786.303.309,00 dari target sebesar Rp9.673.333.000,00.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu: (1) Bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN; (2) Memantau surat persetujuan sewa dan pemindahtanganan yang telah dibuat untuk ditindaklanjuti; (3) Menghimbau satker untuk melakukan optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker belum *aware* untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal. Jika lahan tersebut terletak pada lahan yang strategis seperti di Pasar Hongkong Kota Singkawang, aset BMN dapat dimanfaatkan secara optimal, salah satu contohnya berhasil disewa selama 2 tahun dengan nilai sewa Rp98.800.000,00 selama dua tahun, namun untuk lahan yang berada di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, khususnya yang masyarakatnya masih memiliki lahan yang luas-luas, daya tarik untuk menyewa lahan pada satuan-satuan kerja pun menjadi kurang.

Langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu: bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Bersurat ke satker K/L terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan asset.; (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan wasdal terkait pemindahtanganan & pemanfaatan aset.

b. PNBPN Piutang Negara adalah penerimaan dari pengurusan piutang Negara.

Realisasi PNBPN Piutang Negara sebesar Rp6.429.143,00 dari target awal Rp2.000.000,00 dan target setelah addendum sebesar Rp 5.970.000,00. Hal yang dapat mendukung pencapaian target yaitu dengan melakukan penagihan langsung atau secara *door to door* dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait data penyerahan untuk debitur harus jelas alamat tinggalnya sehingga dapat dilakukan penagihan. Selain itu juga dengan cara penerbitan PSBDT untuk piutang yang memenuhi syarat.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Umur Piutang yang sudah lama serta tidak didukung barang jaminan dan keberadaan debitur tidak diketahui; (2) Tidak ada penyerahan pengurusan piutang baru (sudah koordinasi dengan Penyerah Piutang, namun PP masih belum siap melakukan penyerahan pengurusan piutang; (3) Penyerahan baru hanya sedikit. Dokumen BKPN yang berasal dari Direktorat PKNSI tidak lengkap; (4) Debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi utangnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan berkas kasus piutang

negara yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas. Untuk piutang dari Direktorat PKNSI telah dilakukan konfirmasi ke Direktorat PKNSI. Selanjutnya melakukan penggalan potensi piutang negara/daerah.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan penagihan piutang negara dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang serta menerbitkan PSBDT; (2) Menyampaikan pemberitahuan terkait *crash program* keringanan utang, baik secara langsung maupun surat; (3) Berkoordinasi dan melakukan penggalan potensi piutang dengan satker dan K/L.

- c. PNBP Lelang adalah penerimaan yang berasal dari 1) bea lelang; 2) bea lelang pegadaian 3) denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang; 4) biaya permohonan lelang; 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi; 6) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp3.520.210.197,00 dari target awal Rp1.692.000.000,00 dan target setelah addendum sebesar Rp3.000.000.000,00. Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya realisasi tersebut yaitu Seksi Pelayanan Lelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku dan melakukan penggalan potensi lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, dan

menghimbau kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang terhadap objek yang berpotensi laku.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melaksanakan penggalian potensi lelang dan bersurat kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku; (2) Sosialisasi tentang pelaksanaan lelang di sosial media KPKNL Singkawang

Realisasi Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp6.312.942.649,00 atau tercapai sebesar 49,789% dari total target. Realisasi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan pengelolaan kekayaan negara (pengelolaan BMN), pendapatan dari biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara, dan pendapatan dari bea lelang, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian Pendapatan	Penerimaan PNBP Tahun 2021
1	PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.786.303.309,00
2	PNBP Piutang Negara	Rp6.429.143,00
3	PNBP Lelang	Rp3.520.210.197,00
	Total	Rp6.312.942.649,00

c. Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal				
	1c- Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target sebelum adendum	25%	50%	75%	100% (Rp6.000.000)	MAX/ TLK
Target setelah adendum	25%	50%	75%	100% (Rp110.013.000)	
Realisasi	Rp12.181.819	Rp110.012.594	Rp 202.227.348	Rp202.227.348	
Capaian Kontrak awal	203,03%	2019,77%			
Capaian kontrak adendum	11,07%	100%	183,82%	183,82%	

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut. (1) penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) yaitu Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan, PSBDT; (2) Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2016 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Realisasi Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2016) sebesar Rp23.971.462,00.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan dilakukannya PSBDT terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2016 atau sebelumnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu (1) BKPN tidak disertai dengan barang jaminan; (2) debitur menghilang/tidak diketahui keberadaannya; (3) Banyaknya *outstanding* piutang yang belum diselesaikan;

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan BKPN yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas (penggalian potensi Piutang Negara).

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan debitur; (2) Melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT; (3) Berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan baru; (4) Berkoordinasi dengan KPKNL Pontianak terkait penyerahan piutang dari satker di wilayah Mempawah dan Landak.

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### a. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara Dan Lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	2a- Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara Dan Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	87	87	87	87	MAX/ AVG
Realisasi	97,78	97,78	98,75	98,67	
Capaian	113,67%	113,67%	113,67%	113,56%	

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian pelayanan publik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, diperlukan adanya standar penyelenggaraan atas pelayanan publik tersebut. Untuk itu, disusun Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure/SOP*) atas layanan unggulan pada KPKNL yang diuraikan ke dalam lampiran KMK Nomor 187/KMK.01/2010 yang diubah dengan KMK Nomor 35/KMK.01/2015 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.

SOP layanan unggulan pada KPKNL mengatur kesesuaian prosedur dan batas waktu penyelesaian yang sesuai dengan janji layanan dalam SOP layanan unggulan. Penyelesaian permohonan dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Pada tahun 2021 persentase realisasi layanan yang sesuai dengan SOP layanan unggulan tercapai sebesar 98,67 atau sebesar 113,56% dari target, yang diperoleh dari rata-rata penyelesaian SOP layanan unggulan terhadap dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Layanan	Capaian
<b>A</b>	<b>Layanan yang Menjadi Objek Pemantuan Pengendalian Intern</b>	
1	Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL	100
2	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100
3	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100
4	Penetapan Jadwal Lelang	100
5	Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100
6	Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100
7	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100
8	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100
9	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100

<b>B</b>	<b>Layanan yang Tidak Menjadi Objek Pemantauan Pengendalian Intern</b>	
1	Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100
2	Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	100
3	Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	100
4	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100
5	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	100
Rata-Rata Nilai Capaian		100

KPKNL Singkawang telah melaksanakan implementasi pengendalian internal oleh Unit Pelaksana Pengendalian dan Unit Pemantau Pengendalian Intern (UPPI) untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target yaitu (1) Edukasi secara formal dan informal kepada satker terkait dokumen permohonan PSP; (2) Monev dan pemantauan dari Seksi Kepatuhan Internal; (3) Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan lelang di media social; (4) Melakukan pengecekan manual terhadap data pengembalian uang jaminan dan memproses pengembalian uang jaminan di hari yang sama.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker belum sepenuhnya memahami berkas dan dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk permohonan PSP BMN, pemohon lelang belum memahami prosedur lelang dan belum terbiasa dengan pelaksanaan lelang *online* atau *e-auction*, kesalahan peserta lelang dalam menginput data peserta pada lelang.go.id, serta adanya kendala teknis perbankan. Untuk meminimalisir kendala tersebut yaitu (1) menghimbau satker untuk berkonsultasi sebelum mengajukan permohonan layanan unggulan ke KPKNL; (2) memberikan pemahaman tentang syarat dan ketentuan permohonan layanan unggulan; (3) menyetorkan hasil bersih lelang dan uang jaminan lelang sesuai SOP yang ditetapkan; dan (4) memberikan pelayanan sesuai SOP.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan edukasi kepada satker terkait permohonan PSP BMN, peraturan terbaru di bidang lelang, persyaratan dan pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang; (2) Melakukan pengecekan data pengembalian uang jaminan secara manual dan tetap mengupayakan pemrosesan pengembalian uang jaminan maksimal 1 hari kerja meskipun sedang *overload*.

**b. Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Singkawang tahun 2021 adalah sebesar Rp 64.000.000.000.

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
	2b- Persentase Realisasi Pokok Lelang			
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20
Target Pokok Lelang Kelas I sebelum adendum	20%	40%	70%	100% (Rp27.000.000.000)

Target Pokok Lelang Kelas I setelah addendum	20%	40%	70%	100% (Rp64.000.000.000)
Target Pokok Lelang Pegadaian	10%	30%	60%	100% (Rp18.000.000.000)
Total Target Pokok Lelang sebelum addendum	20%	40%	70%	100% (Rp45.000.000.000)
Total Target Pokok Lelang setelah addendum	20%	40%	70%	100% (Rp82.000.000.000)
Realisasi Pokok Lelang Kelas I setelah addendum	1.122.678.657	64.612.453.679	68.894.736.345	70.927.262.894
Realisasi Pokok Lelang Pegadaian	2.293.704.500	14.261.587.300	21.267.753.300	33.216.726.300
Realisasi Total	3.416.383.157	78.874.040.979	90.162.489.645	104.143.989.194
Capaian Total	4,17%	96,19%	109,95%	127%

Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya realisasi tersebut yaitu Seksi Pelayanan Lelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku, sosialisasi pelaksanaan lelang di media social KPKNL Singkawang dan melakukan penggalan potensi lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3)

Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melaksanakan penggalian potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang, dan mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) melaksanakan penggalian potensi lelang; (2) Mengirimkan surat himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang; (3) Melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

### 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

#### a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

K-Wide	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				
	3a- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	4,7	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	4,91	
Capaian	-	-	-	4,91	

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh pengguna jasa/*stakeholder* yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang diberikan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL di mata publik. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan KPKNL. Nilai ini ditinjau dari pelayanan unggulan (*quick win*) yang dimiliki oleh KPKNL dalam melayani masyarakat secara langsung.

Unsur layanan yang diteliti dalam survei meliputi lima unsur yaitu Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Staf Kantor, dan Kondisi Kantor. Pelaksanaan survei indeks kepuasan pengguna layanan dilaksanakan oleh masing-masing bidang layanan yang terkait langsung dengan pengguna layanan jasa dan diperoleh hasil sebagai berikut.

No	Unsur Layanan	Nilai
1.	Bidang Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara	4,93
2.	Bidang Layanan Piutang Negara dengan Indeks	4,89
3.	Bidang Layanan Pelayanan Penilaian dengan Indeks	4,89
4.	Bidang Layanan Pelayanan Lelang dengan Indeks	4,93
<b>Indeks Kepuasan Stakeholder 2021</b>		<b>4,91</b>

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL telah melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan status capaian hijau, hal tersebut dapat tercapai dikarenakan kerjasama dari seluruh pegawai KPKNL Singkawang untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga kondisi dan fasilitas kantor yang memadai dan baik mendukung pencapaian target IKU ini.

KPKNL Singkawang akan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa/*stakeholder* dan selalu melakukan perbaikan dan inovasi untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

#### 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

##### a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	4a- Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target	-	20%	60%	100% (51 bidang)	MAX/
Realisasi	-	7 bidang	23 bidang	55 bidang	TLK
Capaian	-	5,83%	75,16%	100%	

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban pada lingkup Kementerian Keuangan yaitu: (1) Menyimpan asli sertifikat; (2) *Updating* data BMN yang akan disertipikatkan; (3) Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; (4) Pengalokasian anggaran sertifikasi.

Sertifikasi BMN berupa tanah sangat penting dilakukan. Ini menyangkut bukti legal atau alas hak kepemilikan dari tanah BMN tersebut. Oleh karena itu, KPKNL senantiasa berusaha untuk mengidentifikasi status kepemilikan dari BMN berupa tanah yang berada di dalam wilayah kerjanya. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Hal yang mendukung tercapainya target yaitu aktif melakukan koordinasi dengan BPN tentang progres sertifikasi BMN. Namun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU ini yaitu Satker belum mengusulkan sertifikasi tanah, terdapat bidang tanah yang masih sengketa, masuk dalam kawasan hutan lindung dan bantaran sungai sehingga

belum bisa diajukan sertipikasi. Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap BMN berupa tanah pada satker. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepan yaitu berkoordinasi dan bersurat kepada Kantor Pertanahan di wilayah Singbebas Singkawang terkait bidang tanah BMN yang menjadi target sertipikasi serta melakukan koordinasi dan rapat dengan satker dan Kantah (Singbebas) yang bidang tanahnya menjadi target sertipikasi.

**b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	4-b Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target sebelum adendum	15%	45%	75%	100% (27 BKPN)	MAX/ TLK
Realisasi	7 BKPN	24 BKPN	33 BKPN	33 BKPN	
Capaian kontrak adendum	25,93%	88,89%	122,22%	122,22%	

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) melampaui target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung tercapainya target yaitu koordinasi yang baik antara KPKNL dan BPS dalam hal permintaan data untuk pengisian *form* pada aplikasi portofolio. Namun terdapat beberapa data yang tidak tersedia di BPS sehingga pengisian data akan terhambat.

Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk pencapaian target yaitu selalu berkoordinasi dengan BPS terkait permintaan data yang berhubungan dengan portofolio asset serta bersurat kepada satker untuk menyampaikan target Portfolio Aset tahun 2021. Dalam pencapaian target kedepannya KPKNL Singkawang akan melakukan survei lapangan terhadap objek BMN yang pada Triwulan I 2022 menjadi target Portfolio Aset serta melakukan perhitungan terhadap objek yang menjadi target Portfolio Aset.

**c. Deviasi ketergunaan hasil penilaian**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
	4c- Deviasi ketergunaan hasil penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/ KP
Target	22%	22%	22%	22%	MAX/TLK
Realisasi (Rp)	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil

penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Hal yang mendukung dalam pencapaian target IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian salah satunya yaitu penggunaan data pembanding yang sesuai serta memberikan pemahaman/pengarahan secara informal kepada satker terkait tujuan strategis dari IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dimaksud. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu data pembanding yang outlier, dan penetapan lebih tinggi dari pada nilai wajar hasil penilaian dikarenakan nilai limit yang diusulkan oleh pihak satker terlalu tinggi atau melebihi nilai wajar yang seharusnya. Jika nilai limit yang diusulkan pihak satker lebih tinggi

dari nilai wajar hasil penilaian, maka yang digunakan dalam penetapan/keputusan persetujuan pemindahtanganan/pemanfaatan BMN adalah nilai usulan satker sehingga nilai wajar hasil penilaian tidak digunakan.

Langkah-langkah dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target yaitu melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman dengan pihak satker agar menyampaikan usulan harga didukung dengan data pembanding yang valid dan mengajukan usulan harga yang wajar pada saat melakukan permohonan persetujuan sewa. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu KPKNL Singkawang berkoordinasi dengan pemohon terkait pengajuan usulan nilai limit

## 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

### a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5a- Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	PoI/KP
Target	25%	50%	50%	75%	100% (84)	100%	MIN/ AVG
Realisasi	19	74	74	85	102	102	
Capaian	22,62%	88,10%	88,10%	101,9%	121,43%	121,43%	

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKPN target adalah 84 berkas BKPN.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu melakukan penagihan piutang negara yang berpotensi untuk dapat diterbitkan SPPNL dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan dilakukan PSBDT. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini yaitu rendahnya kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima oleh KPKNL Singkawang, umur piutang yang sudah lama dan keberadaan debitur yang tidak diketahui.

KPKNL Singkawang melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi dan mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penelitian lapangan sekaligus penagihan langsung maupun via telpon terhadap debitur yang berpotensi lunas dan melakukan verifikasi terhadap BKPN lama dan menerbitkan PSBDT. Selain itu juga dengan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan dengan memastikan kelengkapan data dan keberadaan debitur.

Rencana aksi pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT serta berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang.

## b. Persentase Produktivitas Lelang

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	5b- Persentase produktivitas lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target	15%	20%	25%	34%	MAX/TLK
Frekuensi Lelang Laku	13	26	51	80	
Jumlah Frekuensi Lelang keseluruhan	44	82	156	202	
Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela	-	-	-	-	
Capaian IKU	32,50%	31,71%	32,69%	39,60%	

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya IKU Persentase produktivitas lelang yaitu Seksi Pelayanan Lelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku serta berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Kalbar terkait pengumuman lelang melalui *videotron* Universitas Tanjungpura Pontianak, sehingga informasi pelaksanaan lelang pada KPKNL Singkawang dapat menjangkau lebih banyak peminat. Selain melalui *videotron*, KPKNL Singkawang juga melakukan pengumuman pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang setiap hari Selasa dan pada saat-saat tertentu.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan *stakeholder* serta melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Rencana Aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melaksanakan penggalan potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang serta memberikan info pelaksanaan lelang melalui media sosial.

**c. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction***

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	5-c. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4/Y-20	Pol/KP
Target	92%	92%	92%	92%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian IKU	100%	100%	100%	100%	

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu

ALE (Aplikasi Lelang melalui *E-mail*) dan ALI (Aplikasi Lelang melalui Internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi: (1) Pelaksanaan lelang *e-auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang; (2) *E-conventional auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Hal-hal yang mendukung pencapaian target IKU Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* yaitu KPKNL Singkawang selalu menggunakan aplikasi *e-auction* dalam melaksanakan lelang dan memberikan edukasi dan sosialisasi secara lebih intensif kepada pemohon lelang, baik pemohon datang langsung ke KPKNL maupun sosialisasi melalui media sosial KPKNL Singkawang agar pelaksanaan lelang dapat menggunakan aplikasi *e-auction*. Penggunaan aplikasi *e-auction* juga mempermudah pelaksanaan lelang, menghemat anggaran dan *resource* sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Kendala yang mungkin terjadi yaitu terdapat masyarakat masih belum terbiasa dengan pelaksanaan lelang *e-auction* dan belum stabilnya jaringan yang menunjang pelaksanaan lelang *e-auction* di daerah-daerah terpencil serta masih belum ada kesamaan persepsi *stakeholder* tentang manfaat dan kelebihan pelaksanaan lelang *e-auction*.

Rencana aksi kedepannya yaitu edukasi dan sosialisasi kepada *stakeholder*/pemohon lelang baik secara *online* maupun *offline* pada APT dan media sosial.

**d. Indikator Kinerja Utama Deviasi data PNBP Fungsional DJKN**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5d- Deviasi data PNBP Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	MAX/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox (aplikasi lain khusus lelang) dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15%. Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%.

Permasalahan yang bisa terjadi pada pencapaian target IKU ini yaitu data PNBPN pada Aplikasi OM SPAN belum terupdate, hal tersebut biasa terjadi apabila terdapat setoran di akhir bulan berjalan, dan nantinya akan terupdate dengan sendirinya. Selain itu juga tidak adanya *tools* sebagai jembatan untuk sinkronisasi pada aplikasi pengelolaan PNBPN yaitu antara OM SPAN, Focus PN dan Aplikasi Dropbox Lelang.

Upaya yang telah dilakukan yaitu selalu melakukan rekon atau pencocokan data PNBPN dari Focus PN, Dropbox dan OM SPAN di akhir bulan; dan selalu melakukan koordinasi dengan petugas input dropbox lelang untuk segera mengupdate dropbox apabila terdapat penyetoran PNBPN.

Rencana aksi untuk tahun 2022 yaitu (1) Sering melakukan pencocokan data PNBPN dari Focus PN, Dropbox Lelang dan OM SPAN; (2) Melakukan koordinasi dengan petugas input Drobox Lelang, agar segera mengupdate Dropbox apabila telah dilakukan penyetoran PNBPN; (3) Membuat pelaporan berkala setiap bulan berjalan. Hal-hal tersebut bisa menjadi mitigasi atas terjadinya deviasi data PNBPN Fungsional DJKN.

## 6. Edukasi yang Efektif

### a. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

K-Wide	Edukasi yang Efektif						
	6a- Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	89	89	89	89	89	MAX/ TLK
Realisasi	-	93,73	93,73	94	90,92	92,33	
Capaian		105,31%	105,31%	105,31%	103,74%	103,74%	

Dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan diperlukan ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan fungsi DJKN. Bentuk peningkatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara efektif dan komprehensif. Efektifitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (*stakeholders*) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L),

pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Efektifitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuesioner yang memuat 4 Indikator yaitu: tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), kualitas materi (bobot 15%), kualitas fasilitator (bobot 10%), dan kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

## 7. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

### a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	7a- Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	sd Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target		85%	85%	85%	85%	85%	85%	MAX/ TLK
Persetujuan yang ditindaklanjuti Sem II 2020		16	16	16	16	16	16	
Persetujuan yang ditindaklanjuti Sem I 2021		6	6	12	12	12	12	
Persetujuan yang diterbitkan Sem II 2020		16	16	16	16	16	16	
Persetujuan yang diterbitkan Sem I 2021		8	8	12	12	12	12	
Capaian IKU		91,67%	91,67%	100%	100%	100%	100%	

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset yaitu KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan, mengingatkan satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan yang telah diterbitkan.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 yaitu satker belum memahami peraturan terkait wasdal dan tindak lanjut persetujuan yang diterbitkan oleh pengelola barang. Untuk meminimalisir hal tersebut KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan.

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah akan segera melakukan wasdal pada satker yang belum melakukan pelaporan.

## 8. Sasaran Strategis SDM yang Kompeten

### a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Wide	SDM yang kompeten						
	8a- Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	

Jumlah bawahan memenuhi kriteria	6	17	17	17	17	17	MAX/T LK
Jumlah bawahan total	15	17	17	17	17	17	
Capaian Utama	40%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria	6	17	17	17	17	17	
Jumlah bawahan total	15	17	17	17	17	17	
Capaian Tambahan	40%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian IKU	48,00%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran di lakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai dengan

kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2021.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dapat tercapai karena Subbagian Umum KPKNL Singkawang selalu menghimbau kepada para pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya dan bagian penempatan masing-masing pegawai. Selain itu kerjasama seluruh pegawai juga ikut mendukung tercapainya IKU ini. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat beberapa pegawai yang belum mendapat panggilan diklat sesuai tusi pada waktu tertentu. Untuk memitigasi permasalahan yang ada Subbagian Umum mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai melalui aplikasi diklat dan nota dinas ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJKN. Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai serta mendorong pegawai untuk mengikuti *e-learning* di *Kemenkeu Learning Center (KLC)*.

## 9. Sasaran Strategis Organisasi yang fit-for-purpose

### a. Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja berbasis BSC

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	9a- Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja berbasis BSC						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	PoI/KP
Target	-	-	-	-	75	75	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	98,95	98,95	
Capaian IKU	-	-	-	-	120%	120%	

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

*Review* pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
<b>TOTAL</b>		100%

Hal yang mendukung tercapainya IKU Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC adalah menjamin kelengkapan dokumen pada pekerjaan Seksi Kepatuhan Internal baik dari segi laporan maupun kelengkapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Seksi

Kepatuhan Internal dan melakukan dokumentasi dan pengarsipan berkas secara tertata, lengkap dan rapi.

**b. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator**

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	9b- Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	97,6	98,5	98,05	98,5	99,30	98,48	
Capaian IKU	97,6	98,2	98,05	98,5	99,30	120%	

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai *feedback* peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris

Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen.

Hal yang mendukung tercapainya IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator yaitu pejabat yang berkewajiban menyelenggarakan FGD memberikan pemahaman terhadap materi yang disampaikan serta terdapat umpan balik dari peserta FGD.

## 10. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal

### a. Indikator Kinerja Utama Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						
	10a- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/ AVG
Realisasi	-	94,74%	94,74%	95,18%	94,62%	94,62%	
Capaian IKU	-	94,74%	94,74%	95,18%	94,62%	94,62%	

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Hal yang mendukung pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yaitu karena adanya refocusing anggaran untuk anggaran perjalanan dinas, rapat dan kegiatan pelaksanaan belanja modal konstruksi untuk penanganan pandemi. Selain itu masing-masing seksi merealisasikan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD).

Kendala atau permasalahan dalam pencapaian IKU ini yaitu (1) adanya keadaan darurat/pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan berupa tatap muka dan perjalanan dinas menjadi terkendala ketentuan *social/physical distancing* sehingga dapat mempengaruhi realisasi anggaran dan konsistensi antara RPD dan realisasinya; (2) Adanya kebijakan pergantian NPWP dari Bendahara Pengeluaran menjadi KPKNL Singkawang dalam proses belanja barang yang menyebabkan kesalahan SPM sehingga berpengaruh terhadap Nilai IKPA; (3) adanya sentralisasi gaji dan kebijakan revisi anggaran yang menyebabkan terdapat sisa belanja pegawai yang tidak dapat digunakan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak permasalahan tersebut yaitu (1) Melakukan *refocusing* anggaran untuk anggaran perjalanan dinas, rapat dan kegiatan pelaksanaan belanja modal konstruksi; (2) Melakukan revisi anggaran dan RPD untuk memperbaiki data pada Revisi Halaman III DIPA, Target Output dan Mengurangi Pagu Anggaran; (3) Konsultasi dengan Kantor Pusat DJKN cq. Bagian Keuangan dan Kanwil DJPB Kalimantan Barat.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu (1) Membuat rencana kerja tahunan dan melakukan mitigasi resiko berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi Covid-19; (2) Melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD (3) Kegiatan

optimalimalisasi capaian output masing-masing seksi; (4) Kegiatan optimalisasi efisiensi anggaran.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penyerapan anggaran KPKNL Singkawang tahun 2021 sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 95,40% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.049.629.000,00 telah terealisasi sebesar Rp1.955.446.232,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi s.d Triwulan IV	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
2	Belanja Barang	Rp1.328.769.000,00	Rp1.234.586.704,00	92,91%
3	Belanja Modal	Rp720.860.000,00	Rp720.859.528,00	100%
	<b>Total</b>	<b>Rp2.049.629.000,00</b>	<b>Rp1.955.446.232,00</b>	<b>95,40%</b>

Realisasi anggaran pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,56% dibandingkan periode tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan mulai tahun 2020 bulan Agustus dilakukan *cut off* pembayaran belanja pegawai oleh satker, dan untuk belanja pegawai dibayarkan secara terpusat oleh Kantor Pusat DJKN. Realisasi Belanja Barang pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 9,43% yaitu terealisasi sebesar Rp1.234.586.704,00.

### Rincian Belanja Barang tahun 2021

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Barang Operasional	Rp572.637.937,00
2	Belanja Barang Non Operasional	Rp11.358.000,00
3	Belanja Barang Persediaan	Rp80.345.850,00
4	Belanja Jasa	Rp207.924.115,00
5	Belanja Pemeliharaan	Rp265.916.105,00
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp96.404.697,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.234.586.704,00</b>

### Rincian Belanja Barang tahun 2021

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Barang Operasional	Rp572.637.937,00
2	Belanja Barang Non Operasional	Rp11.358.000,00
3	Belanja Barang Persediaan	Rp80.345.850,00
4	Belanja Jasa	Rp207.924.115,00
5	Belanja Pemeliharaan	Rp265.916.105,00
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp96.404.697,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.234.586.704,00</b>

Realisasi Pelaksanaan Anggaran belum maksimal dikarenakan (1) Efisiensi penganggaran kurang optimal, yang disebabkan pelaksanaan efisiensi masing-masing Rincian *Oupput* (RO)

kurang optimal dan akibat *refocusing* sebanyak 4 kali. Mengingat bobot nilai efisiensi di SMART DJA sangat tinggi dan per tahun 2021 kebijakan efisiensi dinilai masing-masing RO. (2) Terdapat deviasi di halaman III DIPA, dikarenakan saat menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) belum diketahui terkait rencana pembayaran termin konstruksi. (3) Adanya keadaan darurat/pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan berupa tatap muka dan perjalanan dinas menjadi terkendala ketentuan *social/physical distancing* sehingga dapat mempengaruhi realisasi anggaran dan konsistensi antara RPD dan realisasinya.

### **C. KINERJA LAINNYA**

Pada tahun 2021 KPKNL Singkawang ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Lelang yaitu Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang, dimana KPKNL Singkawang masuk dalam 17 (tujuh belas) besar. Selain itu KPKNL Singkawang memperoleh penghargaan sebagai unit dengan kualitas penilaian dan pengelolaan data penilaian terbaik tahun 2021 di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan penghargaan sebagai unit dengan capaian lelang terbaik tahun 2021 di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Disamping itu para pegawai KPKNL Singkawang juga turut serta dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan, DJKN maupun eselon I lainnya. Prestasi para pegawai KPKNL Singkawang tersebut antara lain adalah Juara I Lomba Foto Carnival Penilaian Tahun 2021, Juara I Lomba Vlog dalam rangka HUT DJKN ke-15, Juara 2 Video Berdasarkan Penilaian Juri dalam Lomba Video Satu Aksi Seribu Arti untuk Bumi dalam rangka HORI, serta salah satu pegawai KPKNL Singkawang ditunjuk sebagai salah satu pelari dalam Tim Kementerian Keuangan di kategori antar lembaga keuangan dan sekaligus menjadi perwakilan Tim DJKN di kategori antar Eselon I Kemenkeu dalam Oeang Run 2021.

***“Visi DJKN yaitu  
Menjadi Pengelola  
Kekayaan Negara  
yang Profesional  
dan Akuntabel  
untuk Sebesar-  
Besar  
Kemakmuran  
Rakyat”.***

## BAB IV PENUTUP

LAKIN KPKNL SINGKAWANG merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Singkawang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan sebagian besar di antaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singkawang tahun 2021 adalah sebesar 109,17% dalam kategori hijau.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan KPKNL Singkawang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), kemitraan dengan *stakeholder*, dan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara (termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara) dan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, dan hukum.
- d. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan pengguna jasa KPKNL Singkawang.
- f. Memprioritaskan penyelesaian piutang negara antara lain melakukan pemeriksaan harta kekayaan lain milik debitur, dan melakukan penagihan secara persuasif non-eksekusi agar debitur dapat menyelesaikan hutangnya;
- g. Melanjutkan pelaksanaan penggalian potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan dan melakukan *monitoring* dan evaluasi lelang melalui peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang secara intensif;
- h. Implementasi pengendalian intern oleh Unit Pelaksana Pengendalian dan Unit Pemantau Pengendalian Intern (UPPI) untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan kenyamanan kantor dan Area Pelayanan Terpadu;

- j. Merencanakan pengelolaan anggaran secara baik dengan memperhatikan penyerapan dan pencapaian *output* belanja.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan cermin keberhasilan kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2021 secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya KPKNL Singkawang dapat semakin memberikan pelayanan optimal yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat

